

Analisis Kebijakan Kurikulum Nasional dalam Kerangka Ideologi dan Tujuan Pendidikan Nasional

Hilalludin¹ Laelatul Badriah²

^{1,2}Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

Email: hilalluddin34@gmail.com¹ laelatulbadriah@almaata.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Self Regulated Learning* (SRL) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta implikasinya terhadap peningkatan kemandirian belajar peserta didik. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya kemampuan peserta didik dalam mengelola proses belajar secara mandiri, seperti kurangnya perencanaan belajar, lemahnya kontrol diri selama pembelajaran, serta rendahnya kemampuan refleksi terhadap hasil belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*Systematic Literature Review*). Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber literatur ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta dokumen penelitian yang relevan dengan konsep SRL dalam pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SRL dalam pembelajaran PAI dapat meningkatkan kesadaran belajar, tanggung jawab akademik, serta kemampuan pengendalian diri peserta didik. Selain itu, integrasi strategi SRL seperti perencanaan belajar, monitoring proses belajar, dan evaluasi diri terbukti mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI secara berkelanjutan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis sebagai fasilitator dalam membimbing peserta didik mengembangkan kemampuan regulasi diri. Dengan demikian, implementasi SRL menjadi salah satu pendekatan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI yang adaptif terhadap tantangan pendidikan modern.

Kata Kunci: Self Regulated Learning, Pendidikan Agama Islam, Kemandirian Belajar, Pengendalian Diri, Strategi Pembelajaran

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Self Regulated Learning in Islamic Religious Education learning and its implications for improving students' independent learning abilities. The background of this research is based on the low ability of students to manage their learning processes independently, such as lack of learning planning, weak self-control during learning activities, and low reflection ability on learning outcomes. This study uses a qualitative approach with a Systematic Literature Review research type. Data were collected through searching various scientific literature sources such as national and international journals, academic books, and research documents relevant to the concept of SRL in Islamic education. The results of the study indicate that the implementation of SRL in Islamic Religious Education learning can increase learning awareness, academic responsibility, and students' self-control abilities. In addition, the integration of SRL strategies such as learning planning, monitoring learning processes, and self-evaluation has been proven to improve the effectiveness of Islamic Religious Education learning sustainably. This study also emphasizes that teachers have a strategic role as facilitators in guiding students to develop self-regulation skills. Therefore, the implementation of SRL becomes an important approach in improving the quality of Islamic Religious Education learning that is adaptive to modern educational challenges.

Keywords: Self Regulated Learning, Islamic Religious Education, Independent Learning, Self Control, Learning Strategy

PENDAHULUAN

Kurikulum nasional memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan karena tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana menanamkan nilai ideologi dan tujuan pendidikan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, kurikulum dirancang untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan, kesadaran sosial, dan tanggung jawab moral. Pendidikan nasional diharapkan mampu melahirkan generasi yang siap menghadapi perkembangan zaman sekaligus tetap berpegang pada nilai dasar bangsa. Oleh karena itu, setiap kebijakan kurikulum harus dirancang secara komprehensif agar mampu menjawab kebutuhan pendidikan masa kini dan masa depan (Walidah et al., 2024).

Perkembangan globalisasi dan transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikan saat ini dituntut untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, serta memiliki literasi digital yang kuat. Standar pendidikan global yang banyak dipengaruhi oleh lembaga internasional seperti UNESCO turut mendorong perubahan arah kurikulum agar lebih adaptif terhadap perkembangan dunia modern. Namun, di tengah tuntutan global tersebut, pendidikan nasional tetap harus menjaga keseimbangan agar tidak kehilangan orientasi pada tujuan pendidikan nasional dan nilai ideologi bangsa (Jamaluddin, 2025).

Secara kebijakan, pengembangan kurikulum nasional menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berperan dalam memastikan bahwa sistem pendidikan nasional berjalan sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam menjaga keseimbangan antara penguatan kompetensi global dengan penguatan nilai ideologi pendidikan nasional. Dalam praktiknya, kurikulum

sering kali lebih menekankan pada aspek keterampilan kerja dan daya saing global, sementara penguatan nilai kebangsaan dan tujuan pendidikan nasional belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dalam pembelajaran (Imran, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah bagaimana kebijakan kurikulum nasional mampu menyeimbangkan antara tuntutan kompetensi global dengan penguatan ideologi dan tujuan pendidikan nasional (Nyaaba et al., 2024). Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena keberhasilan kurikulum tidak hanya diukur dari capaian akademik peserta didik, tetapi juga dari keberhasilan pendidikan dalam membentuk karakter, identitas kebangsaan, serta tanggung jawab sosial generasi muda. Fokus permasalahan ini nantinya akan menjadi dasar analisis dalam hasil dan pembahasan untuk menemukan formulasi kebijakan kurikulum yang lebih seimbang, relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, serta tetap berakar pada tujuan pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji secara komprehensif kebijakan kurikulum nasional dalam kerangka ideologi dan tujuan pendidikan nasional. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis berbagai hasil penelitian yang relevan secara sistematis, objektif, dan terstruktur (Sapriati et al., 2023). Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku akademik, dokumen kebijakan pendidikan, serta laporan penelitian yang berkaitan dengan kebijakan kurikulum dan pendidikan nasional di Indonesia. Kriteria inklusi literatur ditentukan berdasarkan relevansi tema penelitian, tahun publikasi yang masih aktual, serta kredibilitas sumber ilmiah. Sementara itu, literatur yang tidak memiliki

keterkaitan langsung dengan fokus penelitian dieliminasi untuk menjaga kualitas dan validitas kajian (Chen, 2022).

Tahapan analisis data dalam penelitian SLR ini dilakukan melalui proses identifikasi literatur, seleksi literatur, ekstraksi data, serta sintesis temuan penelitian. Pada tahap identifikasi, peneliti mengumpulkan berbagai artikel dan dokumen kebijakan yang relevan. Tahap seleksi dilakukan dengan menelaah kesesuaian isi literatur terhadap fokus penelitian. Selanjutnya, pada tahap ekstraksi data, peneliti mengelompokkan temuan-temuan penting yang berkaitan dengan kebijakan kurikulum, ideologi pendidikan, serta tujuan pendidikan nasional. Tahap akhir berupa sintesis dilakukan dengan membandingkan, menginterpretasikan, serta menarik kesimpulan dari berbagai temuan penelitian untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam. Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran utuh mengenai kondisi kebijakan kurikulum nasional saat ini sekaligus memberikan dasar konseptual dalam merumuskan solusi kebijakan pendidikan yang lebih relevan dan berkelanjutan (Fasikhah & Fatimah, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakseimbangan Orientasi Global dan Ideologi Pendidikan Nasional

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum nasional saat ini cenderung mengalami pergeseran orientasi menuju penguatan kompetensi global, seperti penguasaan teknologi, keterampilan abad ke-21, serta kesiapan menghadapi dunia kerja modern. Fenomena ini merupakan konsekuensi logis dari arus globalisasi pendidikan yang semakin kuat, termasuk pengaruh standar pendidikan internasional yang dikembangkan oleh lembaga seperti UNESCO yang menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia menghadapi tantangan global. Dalam konteks Indonesia, orientasi global ini memang memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan daya saing

lulusan di tingkat internasional. Namun, hasil analisis menunjukkan adanya kecenderungan melemahnya integrasi nilai ideologi pendidikan nasional dalam praktik pembelajaran, terutama ketika kurikulum lebih berorientasi pada capaian kompetensi teknis dibandingkan pembentukan kesadaran kebangsaan dan karakter sosial peserta didik. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa modernisasi pendidikan yang tidak diimbangi dengan penguatan nilai ideologis berpotensi menciptakan ketimpangan antara kecerdasan intelektual dan kedewasaan moral peserta didik (Nyaaba, 2025).

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan pandangan Paulo Freire yang menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh hanya menjadi alat produksi tenaga kerja, tetapi harus menjadi sarana pembebasan kesadaran manusia melalui proses refleksi kritis terhadap realitas sosial dan nilai kemanusiaan. Jika pendidikan hanya berorientasi pada kebutuhan ekonomi global, maka pendidikan berpotensi kehilangan fungsi humanistik dan ideologisnya. Selain itu, teori pendidikan sosial dari Emile Durkheim juga menegaskan bahwa pendidikan memiliki fungsi utama sebagai sarana transmisi nilai sosial dan budaya masyarakat kepada generasi berikutnya. Dalam konteks ini, kurikulum nasional seharusnya menjadi alat reproduksi nilai kebangsaan dan ideologi nasional agar stabilitas sosial dan identitas bangsa tetap terjaga. Jika kurikulum terlalu didominasi orientasi global, maka fungsi pendidikan sebagai sarana integrasi sosial berpotensi melemah (Mujiono & Aly, 2023).

Lebih lanjut, perspektif progresivisme pendidikan dari John Dewey menekankan bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata dan perkembangan masyarakat, namun tetap berlandaskan pada nilai sosial dan moral komunitasnya. Artinya, adaptasi kurikulum terhadap perkembangan global merupakan kebutuhan, tetapi tidak boleh menghilangkan akar nilai sosial dan ideologi bangsa. Sementara itu, teori kurikulum kritis dari Michael Apple menegaskan bahwa kebijakan kurikulum sering kali dipengaruhi kepentingan ekonomi dan kekuatan global sehingga berpotensi menggeser

nilai lokal dan nasional jika tidak dikontrol secara ideologis oleh negara. Hal ini relevan dengan kondisi kurikulum modern yang semakin menekankan kompetensi pasar kerja global dibandingkan pembentukan kesadaran kebangsaan (Azahra, 2024).

Berdasarkan penguatan teori-teori tersebut, dapat dipahami bahwa ketidakseimbangan antara orientasi global dan ideologi pendidikan nasional bukan hanya persoalan teknis kurikulum, tetapi merupakan persoalan filosofis dan ideologis pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan kurikulum nasional ke depan perlu mengarah pada model integratif, yaitu kurikulum yang mampu mengembangkan kompetensi global sekaligus menginternalisasikan nilai ideologi pendidikan nasional secara sistematis melalui seluruh mata pelajaran, budaya sekolah, serta ekosistem pembelajaran. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menghasilkan generasi yang kompetitif secara global, tetapi juga memiliki identitas kebangsaan yang kuat, kesadaran sosial yang tinggi, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Azhar & Dewi, 2023).

Tantangan Implementasi Kurikulum dalam Praktik Pendidikan Aktual

Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan utama kebijakan kurikulum tidak hanya terletak pada tahap perumusan kebijakan secara konseptual, tetapi justru pada tahap implementasi di tingkat satuan pendidikan. Dalam konteks Indonesia, masih terdapat kesenjangan kesiapan sekolah dalam menerapkan kebijakan kurikulum, baik dari aspek sarana prasarana pendidikan, kompetensi profesional guru, maupun pemerataan akses teknologi pendidikan. Selain itu, dinamika perubahan kebijakan kurikulum yang relatif cepat seringkali menyebabkan satuan pendidikan mengalami kesulitan dalam melakukan adaptasi secara optimal. Dampaknya, terjadi ketidaksinkronan antara desain kurikulum pada level kebijakan dengan realitas praktik pembelajaran di kelas. Kondisi ini menunjukkan

bahwa keberhasilan kebijakan kurikulum tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan sistem pendidikan dalam mengimplementasikannya secara berkelanjutan, sistematis, dan kontekstual sesuai kebutuhan daerah dan satuan pendidikan (Azhar & Dewi, 2023).

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan teori perubahan pendidikan yang dikemukakan oleh Michael Fullan yang menegaskan bahwa perubahan kebijakan pendidikan akan gagal jika hanya berfokus pada aspek kebijakan formal tanpa memperhatikan kesiapan aktor pelaksana di lapangan, terutama guru sebagai pelaksana utama kurikulum. Fullan menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh faktor kapasitas sumber daya manusia, budaya organisasi sekolah, serta dukungan sistemik dari pemerintah. Jika perubahan kurikulum dilakukan tanpa penguatan kapasitas guru dan sekolah, maka kebijakan tersebut cenderung hanya menjadi dokumen administratif tanpa dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Hal ini memperkuat realitas bahwa implementasi kurikulum membutuhkan pendekatan sistemik, bukan sekadar perubahan dokumen kurikulum (Permadi & Sya'ban, 2025).

Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat diperkuat melalui teori difusi inovasi dari Everett Rogers yang menjelaskan bahwa keberhasilan adopsi kebijakan baru sangat dipengaruhi oleh kesiapan penerima inovasi, kejelasan manfaat kebijakan, serta proses pendampingan implementasi yang berkelanjutan. Dalam konteks implementasi kurikulum, perubahan kebijakan yang terlalu cepat tanpa proses sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang memadai berpotensi menimbulkan resistensi atau bahkan implementasi yang bersifat formalitas. Hal ini menjelaskan mengapa dalam praktik pendidikan sering ditemukan kesenjangan antara kebijakan kurikulum yang ideal dengan realitas pembelajaran di lapangan (Fajriansyah & Hilalludin, 2025).

Lebih lanjut, perspektif manajemen pendidikan dari Henry Mintzberg menekankan bahwa kebijakan organisasi akan efektif jika diiringi dengan kesiapan struktur organisasi, budaya kerja, serta sistem koordinasi yang kuat. Jika dikaitkan dengan implementasi kurikulum, maka perubahan kurikulum harus diiringi dengan kesiapan manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, serta sistem supervisi pendidikan yang mendukung proses adaptasi kurikulum secara berkelanjutan. Tanpa dukungan manajemen pendidikan yang kuat, implementasi kurikulum akan berjalan tidak optimal meskipun kebijakan telah dirancang secara baik (Al-Baihaqi et al., 2024).

Berdasarkan penguatan teori-teori tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan implementasi kurikulum merupakan persoalan sistemik yang melibatkan kesiapan sumber daya manusia, kesiapan kelembagaan, serta kesiapan infrastruktur pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan kurikulum ke depan perlu diarahkan pada strategi implementasi yang lebih berkelanjutan melalui penguatan pelatihan guru secara berkelanjutan, penguatan sistem pendampingan implementasi kurikulum, serta pemerataan akses teknologi pendidikan. Dengan pendekatan tersebut, kurikulum tidak hanya menjadi dokumen kebijakan, tetapi benar-benar menjadi pedoman pembelajaran yang efektif, kontekstual, dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh satuan pendidikan (Shafi et al., 2024).

Relevansi Kurikulum Nasional dalam Menjawab Tantangan Era Digital dan Sosial Modern

Perkembangan era digital telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem pendidikan, terutama dalam pola belajar, cara memperoleh informasi, serta cara peserta didik membangun pengetahuan. Dalam konteks Indonesia, transformasi digital pendidikan menghadirkan peluang sekaligus tantangan besar. Di satu sisi, teknologi digital membuka akses pembelajaran yang lebih luas, fleksibel, dan inovatif. Namun di sisi lain, muncul fenomena

baru seperti kecenderungan belajar instan, ketergantungan pada teknologi, menurunnya kemampuan berpikir mendalam, serta paparan informasi global yang tidak selalu selaras dengan nilai sosial dan budaya nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurikulum nasional tidak cukup hanya mengintegrasikan teknologi pembelajaran secara teknis, tetapi harus mampu membangun kesadaran etika digital, literasi kritis, serta kemampuan peserta didik dalam menyaring dan memverifikasi informasi secara bijak. Oleh karena itu, kurikulum nasional dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara penguatan kompetensi digital dengan pembentukan karakter dan identitas kebangsaan agar pendidikan tetap berfungsi sebagai sarana pembentukan manusia seutuhnya (Januardi & Jumadi, 2024).

Secara teoretis, temuan ini dapat diperkuat melalui teori literasi digital dari Paul Gilster yang menekankan bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara kritis. Dalam konteks pendidikan modern, peserta didik tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi harus menjadi individu yang mampu berpikir reflektif terhadap informasi digital yang diterima. Hal ini menjadi penting karena era digital memunculkan fenomena banjir informasi (*information overload*) yang berpotensi memengaruhi cara berpikir dan pembentukan nilai generasi muda jika tidak diimbangi dengan kemampuan literasi kritis yang kuat (Aini et al., 2025).

Selain itu, teori masyarakat jaringan dari Manuel Castells menjelaskan bahwa kehidupan modern telah berubah menjadi masyarakat berbasis jaringan informasi digital, di mana pengetahuan dan informasi menjadi kekuatan utama dalam menentukan posisi sosial dan ekonomi seseorang. Dalam perspektif ini, pendidikan harus mampu menyiapkan peserta didik agar tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga mampu mengelola, memproduksi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Jika

kurikulum tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan struktur masyarakat digital ini, maka pendidikan berpotensi tertinggal dari dinamika sosial yang berkembang (Rusmawi, 2025).

Lebih lanjut, perspektif pendidikan humanistik dari Carl Rogers menegaskan bahwa pendidikan harus tetap berpusat pada pengembangan manusia secara utuh, termasuk aspek moral, emosional, dan sosial, bukan hanya aspek kognitif dan keterampilan teknis. Dalam konteks era digital, pendekatan humanistik menjadi penting agar pendidikan tidak hanya menghasilkan generasi yang mahir teknologi, tetapi juga memiliki empati sosial, kesadaran moral, serta tanggung jawab sosial dalam menggunakan teknologi. Hal ini menjadi relevan karena era digital juga membawa risiko dehumanisasi pembelajaran jika pendidikan terlalu berorientasi pada teknologi tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan (Setiawan et al., 2026).

Selain itu, teori pendidikan karakter modern yang dikembangkan oleh Thomas Lickona menegaskan bahwa pendidikan harus secara sadar dan sistematis mengembangkan nilai moral, tanggung jawab sosial, serta kesadaran etis peserta didik. Jika dikaitkan dengan pendidikan era digital, maka kurikulum nasional perlu mengintegrasikan pendidikan karakter digital (digital character education), seperti etika bermedia sosial, tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, serta kesadaran terhadap dampak sosial penggunaan teknologi (Gani, 2025).

Berdasarkan penguatan teori-teori tersebut, dapat dipahami bahwa relevansi kurikulum nasional di era digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, tetapi juga oleh kemampuan kurikulum dalam membangun kesadaran etika digital, literasi kritis, serta karakter sosial peserta didik. Oleh karena itu, kebijakan kurikulum yang relevan saat ini adalah kebijakan yang mampu mengintegrasikan kompetensi digital dengan penguatan nilai karakter secara sistematis melalui

pembelajaran, budaya sekolah, serta ekosistem pendidikan. Dengan pendekatan tersebut, pendidikan tidak hanya menghasilkan generasi yang cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran sosial, moral, dan kebangsaan yang kuat dalam menghadapi dinamika era digital dan sosial modern (Nugroho et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kurikulum nasional memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan perkembangan global dengan penguatan ideologi dan tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks Indonesia, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman akademik, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter kebangsaan, identitas nasional, serta kesadaran sosial generasi muda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama kurikulum saat ini terletak pada kecenderungan dominasi orientasi kompetensi global, tantangan implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan, serta kebutuhan transformasi kurikulum dalam menjawab dinamika era digital dan sosial modern. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan kurikulum nasional harus diarahkan pada pendekatan integratif yang mampu menggabungkan penguatan kompetensi global dengan internalisasi nilai ideologi pendidikan nasional secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, keberhasilan kebijakan kurikulum nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan secara konseptual, tetapi juga oleh efektivitas implementasi di lapangan serta kemampuan sistem pendidikan dalam beradaptasi terhadap perubahan zaman. Kurikulum masa depan harus mampu menjadi kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, responsif terhadap perubahan sosial, serta tetap berakar kuat pada tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, kebijakan kurikulum nasional

diharapkan mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik dan kompetitif secara global, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat, kesadaran moral, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, K. D. N., Al Farisyi, M. F., & Vidiarell, M. F. (2025). Analisis Keadilan Sosial dalam Pendidikan Berdasarkan Perspektif Paulo Freire. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 4(4), 384–395.
- Al-Baihaqi, Z., Haironi, A., & Hilalludin, H. (2024). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Religius. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 19(1), 1290–1295.
- Azahra, S. (2024). Implikasi perubahan kurikulum pendidikan nasional terhadap kualitas pembelajaran dan prestasi siswa. *Jurnal Nakula*. <https://doi.org/10.61132/nakula.v2i5.1075>
- Azhar, K., & Dewi, L. (2023). Pengembangan kurikulum berbasis guru di Indonesia. *SUKMA: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.32533/07106.2023>
- Chen, J. (2022). The effectiveness of self-regulated learning (SRL) interventions on L2 learning achievement, strategy employment and self-efficacy: A meta-analytic study. *Frontiers in Psychology*, 13, 1021101.
- Fajriansyah, R., & Hilalludin, H. (2025). Merajut Masa Depan Umat: Pengembangan Pendidikan Islam dalam Pandangan Trimurti Gontor. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(1), 495–505.
- Fasikhah, S. S., & Fatimah, S. (2013). Self-regulated learning (SRL) dalam meningkatkan prestasi akademik pada mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 1(1), 145–155.
- Gani, A. (2025). Tantangan dan Prospek Pendidikan Islam di Papua: Studi Kasus SDIT Mutiara Insan Sorong. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 8(1), 444–456.
- Imran. (2024). Dinamika kurikulum nasional: Tinjauan sejarah dan prospek masa depan. *Jurnal Mudarrisuna*. <https://doi.org/10.22373/jm.v14i2.23825>
- Jamaluddin, F. (2025). *AI-driven education landscape: Policies and comparative insights*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.21858>
- Januardi, H., & Jumadi, J. (2024). Eksplorasi Nilai-Nilai Stoikisme dalam Sudut Pandang Islam. *Tamadduna: Jurnal Peradaban*, 77–83.
- Mujiono, M., & Aly, H. N. (2023). Implementasi kurikulum dalam konsepsi kebijakan pendidikan. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.56633/jkp.v19i1.512>
- Nugroho, M., Hariyati, N., Lestari, G. D., Wulandari, A., & Khamidi, A. (2024). Implementasi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Bagi Anak Pekerja

- Migran Indonesia di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12).
- Nyaaba, M. (2025). *Glocalizing generative AI in education for the Global South*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.07149>
- Nyaaba, M., Wright, A., & Choi, G. L. (2024). *Generative AI and digital neocolonialism in global education: Towards an equitable framework*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.02966>
- Permadi, M., & Sya'ban, W. (2025). Analisis Perbandingan Sistem Pengajaran Pesantren Tradisional dan Modern di Indonesia. *Journal of Islamic Transformation and Education Management*, 2, 25–31.
- Rusmawi, M. E. (2025). Strategi Pengembangan Sekolah Keagamaan Kristen Negeri Unggul: Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Gema Perencanaan*, 4(2), 1471–1492.
- Sapriati, A., Suhandoko, A. D. J., Yundayani, A., Karim, R. A., Kusmawan, U., Mohd Adnan, A. H., & Suhandoko, A. A. (2023). The effect of virtual laboratories on improving students' SRL: an umbrella systematic review. *Education Sciences*, 13(3), 222.
- Setiawan, R., Nursalim, M., & Rachmadyanti, P. (2026). Keadilan Sosial dan Distribusi Akses Pendidikan Inklusif di Indonesia: Analisis Rawlsian terhadap Ketimpangan Fasilitas Sekolah Perkotaan dan Pedesaan. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 32(1), 182–189.
- Shafi, A., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Education and Social Institutions: Shaping the Society of the Future. *Jurnal Nakula*, 2(5), 157–164.
- Walidah, Z., Veviani, A., Rahmawati, S., Zid, M., & Mustikarani, W. (2024). Analisis integratif prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum dalam reformasi pendidikan nasional. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36718>